

BAB III

KEBIJAKAN TERKAIT LINGKUNGAN-SOSIAL DI UNI EROPA DAN TRANSFORMASI KEBIJAKAN INDUSTRI TEKSTIL DI INDIA

Rantai produksi global akan diatur oleh perubahan gaya hidup masyarakat atas perkembangan norma-norma internasional yang dianggap etis dan patut dijadikan preferensi. Sebagai pasar utama tekstil India, perubahan atas pertimbangan gaya hidup masyarakat di Uni Eropa mempengaruhi kapasitas ekspor tekstil India dengan adanya kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan dan sosial dalam menjalin kerja sama dengan entitas lain. Masuknya klausul lingkungan dan sosial dalam standar membangun kerja sama dengan Uni Eropa menjadi salah satu hambatan tekstil India yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir akibat stagnasi kerja sama perdagangan yang baru (FTA) dengan Uni Eropa. Dengan melemahnya integrasi tekstil India ke Uni Eropa akibat sejumlah kebijakan dalam menjalin kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan moral, India merespon dengan mentransformasi beberapa kebijakan dalam industri tekstil untuk mengakomodasi praktik keberlanjutan yang disyaratkan Uni Eropa. Namun di sisi lain, dalam proses percepatan industrialisasi, ekonomi ramah lingkungan seharusnya menjadi hal yang dihindari India. Tulisan ini menjawab hipotesis penulis bahwa kebijakan tekstil India yang ramah lingkungan merupakan bentuk respon dari adanya kebijakan kerja sama Uni Eropa

yang menginklusi masalah lingkungan dan praktik etis sebagai bagian dari akumulasi profit yang lebih massif.

A. Pengaruh Industri Tekstil Global Terhadap Perubahan Kebijakan Uni Eropa

Industri tekstil, terutama fashion, masuk ke dalam industri dengan sumber daya paling intens namun lemah akan proses daur ulang. Masifnya permintaan jumlah dalam dunia *fashion & mode* menjadikan tekstil sebagai salah satu industri yang memiliki perputaran rantai produksi paling cepat di dunia. Penelitian *Ellen McArthur Foundation* mengungkapkan bahwa produksi pakaian meningkat dua kali lipat dalam 15 tahun terakhir yang dipicu oleh peningkatan masyarakat kelas menengah dan penjualan per kapita di negara industri maju (Drew & Reichart, 2019). Rata-rata konsumen membelanjakan 60% pakaian lebih banyak di tahun 2014 dibanding tahun 2000. Pasar tekstil global bahkan diperkirakan akan mencapai \$1.3 triliun pada tahun 2025 (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018). Dilansir dari Greenpeace, produksi pakaian global akan meningkat hingga 63% di tahun 2030 (Campione, 2017).

Namun, fenomena *fast fashion* memicu banyak masalah seperti perubahan pada pola tanah dan agrikultur, kualitas air, kesehatan hingga biodiversitas. Dengan kata lain, fashion merupakan salah satu kunci ekonomi utama yang juga memainkan peran dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDG*) karena pada waktu yang bersamaan, industri tersebut menjadi pemicu masalah lingkungan dan sosial (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018). *The House of Commons* Inggris tentang Audit Komite

Lingkungan mengatakan bahwa perusahaan mendorong konsumen membuang pakaian mereka yang masih bagus karena dinilai sudah ketinggalan zaman (Harrabin, 2018). Rantai pasokan tekstil global memahami hasil dari operasi mereka dapat berujung pada aktivitas deforestasi. Sebanyak lebih dari 70 juta pohon ditebang setiap tahun dan diubah menjadi kain seperti rayon, viscose, modal dan sebagainya (Conca, 2015). Akibatnya, sekitar \$500 juta hilang setiap tahun akibat penggunaan minim dan kurangnya daur ulang pakaian (Dory, 2018).

Bahan baku *fashion* sebagian besar diproduksi oleh negara dunia ketiga dengan hukum ketenagakerjaan yang lemah. Sejak pergantian menuju abad ke-21, para pekerja di seluruh dunia disibukkan dengan berbagai jam tambahan kerja akibat kurva permintaan cepat dan masif yang berujung pada eksploitasi tak terkecuali industri tekstil di mana 75% pekerjanya merupakan wanita (Supriya & Vidya, 2012). Tanpa menyebut nama-nama *brand* papan atas, penelitian dari *University of California* menyebut 85% buruh tekstil bekerja secara eksklusif untuk pengiriman ke Uni Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa perusahaan memang mulai berusaha untuk menghentikan kekerasan dalam rantai pasokan tekstil, namun mereka belum termotivasi untuk memberikan edukasi mengenai perlakuan terhadap buruh (Ratcliffe, 2019).

Fast fashion juga dikaitkan dengan kondisi kerja yang tidak layak terkait zat berbahaya yang digunakan dalam industri termasuk rantai produksi yang panjang membuat pekerja terjebak dalam jam kerja panjang, tidak memadai dan upah rendah (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018). Untuk itu, industri tekstil setidaknya mengadopsi tiga etika yang diperhatikan masyarakat

global; *fair trade* (meliputi kondisi kerja, perlakuan dan upah yang layak), *sustainability* (mengurangi dampak negatif ke lingkungan) dan *slow fashion* (mencakup kualitas produk; tahan lama) (Grant, 2019). Sebanyak 60% produksi tekstil global diproduksi oleh China dan India, dua negara yang sangat bergantung pada industri berbahan bakar batubara (Nature Climate Change, 2018).

Ellen MacArthur Foundation mengungkapkan satu truk atau sekitar 2,265 kg sampah tekstil dibuang setiap detik atau sekitar 700,000 serat pakaian yang dihasilkan dari sampah setiap rumah tangga. Sementara *Copenhagen Fashion Summit* melaporkan 92 juta ton tekstil bertanggung jawab atas penumpukan sampah padat setiap tahun dan membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun agar pakaian yang kita kenakan dapat benar-benar terurai (Drew & Reichart, 2019). Sampah-sampah ini menjadi penyumbang emisi karbon terbesar kedua setelah makanan yang jumlahnya mencapai 1.2 miliar ton di tahun 2015 (Harrabin, 2018). Sebanyak 20% limbah air global diproduksi dari industri fashion yang juga melepaskan 10% emisi gas karbon global, melebihi angka gabungan dari semua penerbangan dan pelayaran di seluruh dunia (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018). Produksi kain serta sintesis juga menghasilkan gas N₂O, yang lebih 300 kali lebih merusak dari CO₂. Laporan *Pulse of the Fashion Industry* bersama GFA dan *the Boston Consulting Group* mengungkap bahwa di tahun 2015, industri tekstil global bertanggung jawab atas konsumsi 79 miliar ton meter air, 1.715 juta ton emisi CO₂, dan 92 juta sampah. Prediksi tahun 2030 bahkan menyebutkan angka-angka di atas akan meningkat sebesar 50% dalam skenario *business-as-usual* (Šajn, 2019). Pertanian kapas juga bertanggung jawab atas penggunaan 24% insektisida dan

11% pestisida meskipun hanya menggunakan 3% dari seluruh tanah subur di dunia (UN Economic Commission for Europe (UNECE), 2018).

Seiring waktu, muncul *backlash* terhadap *fast fashion* dan kebiasaan ‘sekali pakai’. Dalam 15 tahun terakhir, permintaan fashion beretika yang awalnya dipandang skeptik mulai menjadi pertimbangan dan akhirnya berkembang. Permintaan akan merk berlabel *eco-friendly*, *fair trade* hingga *animal rights* membuat industri pakaian mulai merubah landscape dengan meningkatkan standarisasi kode etik. Para konsumen beretika cenderung menampilkan gaya hidup selektif terkait apa konsekuensi dari membeli dan memakai (khususnya pakaian)/barang tertentu. Menurut sejumlah lembaga survei menyebutkan sekitar 65-70% konsumen di bawah usia 35 tahun di seluruh dunia cenderung memilih produk dari brand atau retail yang berkontribusi pada praktik-praktik etis (Bertelsmann Foundation, 2016).

Berdasarkan penelitian PEFC, 80% konsumen bahkan menginginkan *brand* yang mereka beli memiliki label praktik-praktik bertanggung jawab sesuai dengan preferensi mereka sementara 54% menghendaki adanya sertifikasi resmi yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ramah lingkungan dan mengarusutamakan keberlanjutan. Selain itu, para peneliti mengungkapkan konsumen akan dua kali lebih memilih produk yang berlabel *eco-friendly* dan *fair trade*. Harvard Business Review menyebutkan bahwa label produk pada *brand* pakaian mulai memainkan peran penting akibat pengaruh masyarakat (Moore, 2019). Selain itu, pembeli juga menginginkan adanya transparansi zat yang digunakan dalam pembuatan suatu produk *restricted substances list*

(RSL) yang dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan (Kumar, Begum, & Das, 2018).

Namun sejumlah standar baru seperti transparansi dari komposisi produk dan keterlacakan mengenai kondisi lingkungan kerja dan buruh memicu suatu produk memiliki harga jual yang lebih mahal. Meskipun demikian, The Nielsen Company menunjukkan data dari 30.000 konsumen di 60 negara pada tahun 2015, 68% dari mereka siap membayar lebih untuk produk yang menekankan *sustainability*. Penelitian ini meningkat dari hanya 50% saja pada dua tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menekankan keberlanjutan memiliki poin lebih dari pesaing lain (Russell, 2018). Sementara itu, salah satu tesis dari *Stockholm Business School* mengungkapkan bahwa konsumen *fashion* yang hidup di negara demokrasi cenderung mulai memperhatikan kondisi kerja di negara-negara penyuplai bahan baku meskipun sebagian besar menyalahkan pemerintah yang tidak menerapkan aturan ketat terkait pelacakan rantai pasokan, bukan didasarkan pada perilaku individual (Zellweger, 2017). Setidaknya 17 dalam 30 besar negara dengan index demokrasi tertinggi berasal dari Uni Eropa dengan tujuh negara yang mengadopsi sistem *full democracy* pada survei tahun 2010 (The Economist Intelligence Unit, 2010). Konsumen yang mulai memperhatikan isu-isu lingkungan dan sosial mulai berkembang di Uni Eropa terutama sejak pemanasan global dan banyaknya kasus eksploitasi buruh dalam industri tekstil ditemukan.

Survei menunjukkan bahwa 44% konsumen terlepas dari kategori usia dan pendapatan, mulai membeli pakaian produk lokal atau dalam Uni Eropa di mana aturan *sustainable garment* mengikat dalam rangka menuju

climate neutral (Grant, 2019). Seiring dengan meningkatnya 77 juta konsumen yang khawatir dengan lingkungan dan etika perdagangan, penjualan pada produk dengan sertifikasi *fairtrade* meningkat menjadi 80% dari €4.38 juta di tahun 2010 menjadi €7.88 juta di tahun 2016 (International Trade Centre & European Commission, 2019). Tahun 2019, sebanyak 2/3 dari konsumen Uni Eropa mengatakan telah beralih pada *brand-brand* yang menekankan praktik positif terhadap lingkungan dan sosial (Schaart, 2019). Sementara survei dari *Morgan Stanley Research* tahun 2016 di Inggris menunjukkan bahwa setengah dari jumlah populasi kaum muda melihat *ethical credential* sebagai sesuatu yang diperhitungkan bahkan dinilai penting (Russell, 2018). Perubahan pola perilaku konsumen ini kemudian menjadi penyebab perubahan *game for brands* untuk memikirkan kelangsungan produknya dengan memperhatikan nilai-nilai etisme termasuk di dalamnya detail informasi terkait bahan baku, produksi hingga upah buruh serta kelayakan lingkungan bekerja.

Dengan adanya berbagai dampak negatif dari industri tekstil global, fenomena pakaian berkelanjutan kemudian menjadi diskursus baru yang menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan di ranah global. Marie Chartadova, presiden dari *Economic and Social Council* (ECOSOC), mengatakan bahwa industri fashion harus merubah sistem produksi konsumsi. Sementara itu, sekretaris eksekutif *UN Economic Commission for Europe* (UNECE), Olga Algayerova menekankan bahwa sudah saatnya membawa tend fashion yang lebih berkelanjutan (UNECE, 2018). Pada 1 Januari 2016, terdapat 5 dari 17 program pembangunan keberlanjutan (*Sustainable Development*

Goals/SDGs) PBB yang menginklusi keseluruhan proses pada industri tekstil yakni (Richero & Ferrigno, 2017):

1. Kesetaraan gender (SDG 5)
2. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8)
3. Industri, inovasi dan infastruktur (SDG 9)
4. Mengurangi ketidakadilan (SDG 10)
5. Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab (SDG 12)
6. *Climate action* (SDG 13)

Uni Eropa, pasar ekspor utama tekstil India, mendeklarasikan diri sebagai pusat *sustainable apparel*. Seiring dengan meningkatnya masyarakat yang peduli dengan lingkungan dan etika perdagangan, Komisi Eropa pada tahun 2018 menyatakan bahwa kawasan tersebut mulai kritis dengan sumber yang berkelanjutan; yang minim kerusakan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, regulasi yang jelas dan memadai hingga kondisi kerja yang layak (International Trade Centre & European Commission, 2019). Sebagai bagian dari *Fashion Revolution*, UE membentuk platform *the centre for the promotion of imports* (CBI) di bawah Kementerian Luar Negeri Uni Eropa yang memberi panduan standar ekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa mengharuskan deskripsi produk berisikan transparansi terhadap dampak-dampak lingkungan dan sosial termasuk di dalamnya kualitas, material, label hingga *simple packaging* yang disepakati melalui *Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textiles* sejak tahun 2018 dengan target implementasi

hingga 80% di tahun 2020 (CBI Minister of Foreign Affairs, 2019).

Beberapa dekade lalu, produksi tekstil di dalam Uni Eropa cukup berkembang. Namun, pemberian kuota tekstil oleh rezim perdagangan internasional (WTO) meningkatkan konsumsi impor dari 33% di tahun 2004 menjadi 84% di tahun 2012 dan terus meningkat. Komisi Eropa mencatat di tahun 2015, China, India, Bangladesh, Vietnam, Kamboja dan Turki menjadi eksportir tekstil utama ke UE (Šajin, 2019). Kerangka Uni Eropa terkait tekstil sudah dirancang sejak tahun 1970-an. Seiring waktu, kawasan supranasional tersebut mulai menginklusi sistem transparansi dan keberlanjutan melalui sejumlah regulasi dalam *European Standards* (Cone, 2006). Dalam *European Standards*, terdapat setidaknya dua label; (1) CEN/TS yang merujuk pada klaim lingkungan dalam lingkaran tekstil, dan (2) EU ecolabel yang mencakup kriteria ekologis termasuk penggunaan bahan kimia dan air. Adapaun instrument legal yang diaplikasikan untuk negara anggota yaitu *The EU Green Public Procurement* (GPP) (Šajin, 2019).

Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) merupakan regulasi Uni Eropa yang digagas di tahun 2006 dan diimplementasikan tahun 2007 sebagai standar penggunaan bahan kimia dalam produk-produk yang mengalir di Eropa yang memiliki potensi dampak pada lingkungan dan kesehatan. Regulasi yang memakan waktu hingga tujuh tahun ini merupakan kebijakan paling penting bagi Uni Eropa dan aturan paling ketat yang mempengaruhi industri di seluruh dunia karena mengatur hingga lebih dari 30.000 zat kimia (Cone, 2006). Dalam sektor tekstil, regulasi Uni Eropa terkait lingkungan

membatasi penggunaan pewarnaan amina yang mengandung cadmium dan zat merkuri untuk tahap akhir pakaian hanya <30 *part per million* (Khorana, Yeung, Perdikis, & Kerr, 2010). Karena pemerintah dan perusahaan-perusahaan India memiliki akses yang kurang ke ruang laboratorium serta komponen pengujian lain, sebagian besar akreditasi dan hasil tes tidak dikenali oleh pengimpor dari Uni Eropa. Selain itu, pengimpor meminta agar ekspor tekstil India diuji dan disertifikasi oleh agen resmi yang diakui Uni Eropa seperti *SGS Testing, Specialised Technology Resources Inc.* atau laboratorium-laboratorium yang berada di kawasan Uni Eropa (Khorana & Soo, 2016).

Tahun 2011, Parlemen Eropa mulai memberi obligasi bagi negara anggota untuk mencantumkan label proses industri dan distribusi serta komposisi bahan yang masuk dalam *Textile Regulation of 2011* (International Trade Centre & European Commission, 2019). Parlemen Eropa juga menetapkan seluruh pabrik di dalam kawasan harus melabeli semua produk non-makanan mulai April 2014. Di tahun 2015, Dewan Eropa mendeklarasikan secara resmi pengadopsian *SDGs* melalui dokumen *EU and the Responsible Global Value Chains* yang dipublikasi secara online pada Januari 2017. Di dalam dokumen berisi 12 poin tersebut terdapat kalimat bahwa semua negara maju atau negara yang sedang dalam pertumbuhan ekonomi harus mengalamatkan isu *behind-the-border* seperti fasilitas perdagangan, standard dan regulasi teknis, regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan, investasi dan sebagainya (Richero & Ferrigno, 2017). Garis besar dalam dokumen ini mengindikasikan bahwa agenda promosi pembangunan keberlanjutan Uni Eropa ke lingkup global mulai terealisasikan dengan sejumlah

aturan standar impor ke kawasan tersebut dan perputaran kerja sama internal.

Pada April 2017, kebijakan ekspor tekstil ke UE semakin diperketat dengan munculnya aturan legal melalui *EU Flagship Initiative* oleh Parlemen dan Komisi Eropa bagi perusahaan-perusahaan UE untuk melacak rantai suplai produksi di negara-negara ketiga terkait isu tenaga kerja dan lingkungan (Šajin, 2019). Di tahun 2016, Parlemen Eropa juga mengadopsi sejumlah kebijakan atas penggunaan kapas dalam rantai produksi global yakni *Better Cotton Initiative* (BTI), *the Global Organic Textile Standard* (GOTS) dan beberapa inisiatif lain bersama para penanam modal yang bekerja melalui *The International Cotton Advisory Committee* yang bertujuan untuk meminimalisir dampak degradasi lingkungan. Sebagian besar pengecer Uni Eropa juga mulai melakukan revolusi *greening* dalam rantai suplai mereka seiring meningkatnya permintaan konsumen yang peduli akan etika perdagangan dan preferensi lingkungan (International Trade Centre & European Commission, 2019). Namun, *fashion* diproduksi dalam lingkaran produksi yang kompleks.

Pada tahun 2018, UE bahkan secara resmi memasukan tekstil ke dalam sirkularitas ekonominya dan menjamin anggotanya untuk mengadopsi kebijakan yang sama di tahun 2025 yang mana hal tersebut merupakan pukulan bagi pemasok dari dunia ketiga (Šajin, 2019). Melalui *EU's Waste Framework Directive*, negara anggota diminta untuk memilah-milah sampah tekstil termasuk memisahkannya dengan tekstil yang mengandung bahan kimia berbahaya hingga tahun 2025 (Schaart, 2019). Akibat adanya penekanan pada sejumlah regulasi internal atau dapat dilihat oleh negara eksportir dari luar Kawasan sebagai *Eurozone Protectionist Agenda*, beberapa

eksportir dari luar kawasan harus mencari celah melalui strategi agar produknya dapat memenuhi standar konsumen di kawasan dengan harga yang lebih rendah.

Dengan adanya berbagai kekhawatiran lingkungan yang disisi lain menginklusi hak-hak buruh tekstil, rantai tekstil global perlu mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan. Ketika pakaian dapat digunakan sebanyak dua kali atau lebih, keluaran gas rumah kaca dapat menurun hingga 44%. Menurut laporan *Pulse of the Fashion Industry* tahun 2018, perusahaan-perusahaan berbasis pakaian olahraga dan brand-brand ternama mulai menginvestasikan modal pada teknologi yang berkelanjutan terkait kekhawatiran akan hilangnya jumlah konsumen (Šajin, 2019).

B. Perubahan Dalam Kebijakan Tekstil India

Perkembangan industri tekstil dengan penggunaan teknologi konvensional dan bahan kimia menempatkan India sebagai partisipan konstruktif dalam isu-isu iklim (Bhutoria, 2018). Seiring waktu, klausul lingkungan dan sosial yang selama ini dihindari India mulai memasuki kerangka kerja sama dengan berbagai entitas dan menjadi salah satu pertimbangannya. Isu-isu non-tradisional yakni perlindungan lingkungan dan HAM yang dilihat sebagai (*non-tariff barriers*) diinklusi Uni Eropa dalam menjalin perjanjian dagang termasuk dengan India yang kini menjadi salah satu hambatan ekspor (Mehta, 2005). Ketika *multi fibre agreement* (MFA) resmi dihapus pada tahun 2005, ekspor tekstil India ke Uni Eropa memang mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2008, ekspor India mengalami penurunan akibat negosiasi perjanjian dagang yang baru (FTA) dengan Uni Eropa belum tercapai di tahun 2007 (Manoj, 2014). Adanya klausul lingkungan

dan sosial yang menjadi standar Uni Eropa dalam membangun kerja sama menjadi salah satu kendala ekspor tekstil India hingga saat ini. Uni Eropa menetapkan aturan bagi pihak-pihak yang ingin membangun kerja sama harus mendukung pembangunan berkelanjutan yang tergolong dalam tiga dimensi yakni (1) pembangunan ekonomi, (2) pembangunan sosial dan (3) perlindungan lingkungan (European Economic and Social Committee, 2019).

Pasca tahun 2007 setelah India dan Uni Eropa memulai negosiasi perdagangan yang baru (FTA), para pengamat melihat adanya perubahan kebijakan iklim di India sebagai salah satu bentuk respon (Thaker & Leiserowitz, 2014). *The National Action Plan on Climate Change* tahun 2008 kemudian diadopsi untuk mempromosikan tujuan-tujuan pembangunan India yang dibarengi dengan upaya memperoleh keuntungan dari mengatasi perubahan iklim (Dubash, 2013). Meskipun demikian, beberapa kebijakan tersebut masih belum diaplikasikan secara menyeluruh. Misalnya, India menargetkan implementasi energi matahari mencapai 20GW tahun 2022, namun penggunaan batubara masih intens di mana laporan *International Energy Agency* tahun 2013 menyebut emisi CO₂ India akan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 (Thaker & Leiserowitz, 2014). Tahun 2013, FTA India-Uni Eropa mengalami stagnasi akibat sejumlah kesepakatan yang belum tercapai serta adanya klausul lingkungan dan sosia (Manoj, 2014).

Singh Covergence Principle kemudian diadopsi guna menekankan koordinasi nasional untuk penilaian, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilihat oleh dua ilmuwan iklim, Thaker dan Leiserowitz, sebagai bentuk pragmatis dalam perubahan kebijakan India dalam merespon perubahan iklim (Thaker & Leiserowitz, 2014). Adanya

perubahan kebijakan ini dinilai sebagai kelanjutan respon penekanan hambatan non-tariff negara-negara importir khususnya Uni Eropa yang memasukan standar-standar lingkungan dan sosial ke dalam kerangka kebijakannya sejak tahun 2006 dan akhirnya menjadi pertimbangan untuk membangun kerja sama dengan entitas lain. India menurut pengamat dari National Law University di New Delhi memahami bahwa kebijakan dan strategi yang tepat dengan menggabungkan kekhawatiran akan lingkungan dan pembangunan akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih masif (Lakshmanan, Singh, & Astalakshmi, 2017).

Profesor iklim, energi dan lingkungan dari Centre for Policy Research, Navroz Dubash, memaknai kalimat ‘manfaat tambahan’ atau (*co-benefit approach*) dari pernyataan PM Mahmoan Singh mengenai mitigasi perubahan iklim sebagai prioritas politik meskipun pemerintah India tidak secara eksplisit mengungkapkan makna harfiah dari manfaat tambahan tersebut (Dubash, 2013). Langkah India dalam transformasi sejumlah kebijakan yang menginklusi lingkungan tersebut juga dilihat oleh para kritikus sebagai sebuah kompromi untuk mengimbangi praktik keberlanjutan global. PM India yang baru menjabat, Narendra Modi mengatakan bahwa lingkungan global merepresentasikan kesempatan langka bagi India untuk menjadi pemimpin lingkungan. Pernyataan ini diidentifikasi oleh penelitian dari South Asia Research sebagai hal yang unik karena transformasi kebijakan India tidak menunjukkan kekhawatiran keluaran emisi karbon dari industri dalam negeri melainkan *branding* ekonomi dari perubahan gaya hidup (Saryal, 2018).

Pada akhir tahun 2016, India mulai meratifikasi Perjanjian Paris yang ditindaklanjuti dengan implementasi dan transformasi sejumlah kebijakan dalam industrinya guna mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca di tahun 2030. Beberapa tahun sebelumnya, dunia internasional menyebut India sebagai *deal breaker* karena menolak untuk menandatangani COP17 di Durban terkait kepentingan politik yang menjadi prioritas (Thaker & Leiserowitz, 2014). Hal tersebut kemudian menggerakkan India untuk menunjukkan komitmen apabila menginginkan berkelanjutan, maka harus ada sebuah gerakan transformasi untuk menunjukkannya. Adanya bukti peningkatan jumlah pembelian terhadap *sustainable products* di sejumlah negara Uni Eropa yang diperkuat oleh beberapa survei independen maupun dari Uni Eropa sendiri, India kemudian menciptakan alternatif pasar baru agar produknya dapat diterima konsumen di Eropa yang mulai mengarusutamakan kata *sustainability* dalam perilaku konsumen mereka (Berkel, 2017).

India merupakan poluter gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah China dan Amerika Serikat. Melalui Perjanjian Paris, India berkomitmen untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakatnya sebagaimana penekanan Mahatma Gandhi pada *conservancy of resources* dan *deficiency in wastes*. Ratifikasi Perjanjian Paris diharapkan dapat menciptakan industri yang ramah lingkungan berdasarkan *UN Sustainable Development Goals/SDGs* sebagaimana pernyataan duta besar dan perwakilan India di PBB dan sejumlah organisasi internasional di Jenewa, Ajit Kumar (Sonowal, 2018). Dengan target untuk mengurangi intensitas emisi 33-35% di tahun 2030, India menekankan beberapa komitmen yakni:

1. Program masif energi yang dapat diperbarui
2. *National Water Mission*
3. Promosi *climate actions* oleh bisnis
4. Pembersihan sungai, *Swachh Bharat Mission*, *Zero Defect Zero Effect*, *Make in India*
5. Pembangunan yang berkelanjutan, dsb

Dalam sektor tekstil, India menekankan transformasi kebijakan program masif energi yang dapat diperbarui dalam kerangka *the National Solar Mission* dan *the National Mission for Enhanced Energy*, *Zero Defect Zero Effect*, dan skenario *Make in India* dengan target pemenuhan SDG 5: kesetaraan gender, SDG 6: air bersih dan SDG 7: energi terbarukan (Textile Exchange, 2018). Ketiga komitmen India dalam SDGs PBB di atas merupakan arena yang juga masuk dalam kerangka revolusi industri tekstil global. Beberapa kebijakan tersebut telah diinisiasi pada tahun-tahun sebelumnya terutama pada momentum pasca tahun 2007 di bawah PM Singh.

Tahun 2014, Perdana Menteri India yang baru menjabat, Narendra Modi mulai mengeluarkan inisiatif *Make in India* tahun 2014 dengan instrumen *Zero Defect Zero Effect* yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas bagi industri kecil dan menengah dengan kualitas yang baik tanpa merusak lingkungan. *Zero defect* ditujukan untuk konsumen yang berarti tidak ada ketidaksesuaian dan *zero waste*. Sedangkan *zero effect* berlaku untuk lingkungan-sosial India yang artinya tidak ada polusi udara, limbah, pemborosan energi (Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, 2017). Dalam Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg tahun 2017, PM Narendra Modi kembali menegaskan komitmen India untuk mengurangi polusi dan menciptakan ekonomi

yang berkelanjutan. Modi bahkan menyebutnya sebagai tindakan kriminal secara moral apabila dunia tidak melakukan sesuatu terhadap perubahan iklim. Negara tersebut berjanji akan menyerap 2.5 hingga 3 miliar gas CO₂ dengan menanam pohon serta akan mencapai target energi terbarukan hingga 40% di tahun 2030 (Segran, 2019). Dalam program *India Resource Panel*, sektor agrikultur akan ditekankan pada program *more crop per drop* yang fokus pada manajemen nutrisi, penggunaan air dan keberlanjutan (Bhutani & Arya, 2017).

Dalam upaya mengembangkan tekstil yang ramah lingkungan sebagai sistem komprehensif yang diadvokasikan negara-negara Barat, India kembali mempertimbangkan 7 jenis bahan kimia yang sering digunakan dalam tekstil seperti *formaldehyde*, cadmium, pentachlorophenol, hexavalent chromium, pestisida beracun, zat yang mengandung logam berat, zat yang mengandung halogen dan klorin serta azo yang mengandung amina. Sebagai informasi, zat azo yang mengandung amina dengan 22 komponen lain yang digunakan dalam agrikultur, proses pewarnaan dan pencelupan ini sebelumnya sudah dilarang oleh kementerian lingkungan dan perhutanan tahun 1997 menanggapi larangan yang sama oleh Jerman di tahun 1994 dan Belanda di tahun 1996 yang memimpin Uni Eropa memberlakukan standar umum (Textile Committee, 2014). Aturan yang diprakarsai Jerman dalam pelarangan penggunaan pewarna azo ini sempat menurunkan ekspor tekstil India yang 70% produk tekstilnya mengandung pewarna azo (Begum & Kumar, 2018).

Dengan adanya sejumlah pelarangan zat kimia tertentu dalam aturan REACH Uni Eropa, beberapa kebijakan mulai diinisiasi untuk merespon larangan dan aturan

tersebut. *The Council of Leather Exporter* menegaskan setiap *tannery* di negara bagian Tamil Nadu harus memiliki akses ke pengolahan limbah. Aplikasi pengolahan limbah juga dipasang di Bangalore, Kanpur dan Jalandhar. Setidaknya 15 dari 20 *tanneries* di India telah memperoleh sertifikasi ISO: 14001. Para ilmuwan dari Central Leather Research Institute di Chennai juga mengembangkan enzyme, amylases, yang digunakan untuk mengganti kapur pada proses pewarnaan produk berbahan dasar kulit (Mehta 2007). Pada awal Maret 2019, kementerian lingkungan, perhutanan dan perubahan iklim mengeluarkan amandemen UU baru dari tahun 2016 *the hazardous waste (management & transboundary movement)* yang menegaskan bahwa limbah plastik padat dilarang untuk unit-unit eksportir yang harus diolah di tempat-tempat pengolahan limbah yang memiliki otoritas. Selain itu, eksportir sutra wajib memiliki izin dari kementerian lingkungan, perhutanan dan perubahan iklim (Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 2019).

Meskipun hambatan non-tariff hanya satu dari berbagai hambatan ekspor tekstil India ke Uni Eropa dalam 41 bulan terakhir, adanya klausul HAM dan lingkungan menggerakkan India untuk mengakomodasi sejumlah persyaratan tersebut agar kesepakatan mengenai kuota, komoditi dan tariff impor yang baru dapat segera tercapai. Dengan kata lain, awal perubahan dalam lingkaran tekstil India ini merupakan salah satu upaya untuk mengakomodasi kebijakan di Uni Eropa mengenai sejumlah aturan yang menginklusi klausul lingkungan dan jaminan sosial (HAM). Hal ini dilandasi pada ketakutan ekonomi bahwa salah satu faktor terhambatnya ekspor tekstil India dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa

FTA yang baru tidak segera tercapai apabila India mengesampingkan ketidakinginannya untuk menginklusi standar lingkungan dan sosial yang sesuai dengan keinginan pasar Eropa (Khandual & Pradhan, 2019).

Dalam forum internasional yang diselenggarakan pemerintah India yang berkolaborasi dengan *Gujarat Cleaner Production Center (GCPC)* dan *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)* pada 30 Juni-2 Juli 2017, PM Narendra Modi mengumumkan bahwa perusahaan tekstil harus mengubah rantai produksi tekstil yang mulai harus mempertimbangkan lingkungan dan perubahan permintaan konsumen atas transparansi dan etika fashion (Berkel, 2017).

Hal ini disebabkan karena sejumlah *brand-brand* dan pemasok ternama Uni Eropa yang menyuplai bahan dari China dan India mulai mentransformasi rantai produksinya berdasarkan perubahan gaya hidup konsumen sehingga banyak diantaranya mensyaratkan standar yang ketat termasuk melalui kebijakan pemerintah dari negara asal. Penelitian dari Istanbul Technical University mengatakan bahwa tekstil dan pakaian yang diproduksi dengan bahan kimia massif mulai memiliki daya minat yang rendah di pasar Eropa terkait dampaknya pada lingkungan dan sosial pekerja di pabrik yang menurut data WHO menunjukkan setidaknya 20.000 kematian akibat keracunan bahan kimia di pabrik tekstil di negara-negara berkembang (Eryuruk, 2016). Beberapa zat kimia yang dilarang dalam tekstil misalnya azo dan 22 zat lain yang mengandung amina termasuk kampanye anti detox Greenpeace yang mulai diadopsi H&M, Nike, Puma, Esprit dan sebagainya menjadi bukti bahwa klausul lingkungan yang dibawa dalam advokasi UE terkait SDGs

memang menjadi tantangan non tariff (*non tariff barriers*) bagi para eksportir ke kawasan tersebut untuk merubah rantai produksi (CBI Ministry of Foreign Affairs, 2018).

Hennes & Mauritz (H&M), brand Swedia yang mengglobal, merupakan pencetus dalam dunia fashion yang mengadopsi nilai-nilai etis. Sebanyak kurang lebih 80% suplai produk H&M berasal dari Asia (Pandey, 2018). Di negara asalnya, 17% masyarakat Swedia merupakan konsumen yang memiliki preferensi tinggi terhadap nilai-nilai etis. Di tahun 2030, H&M menargetkan untuk mengadopsi sistem sirkularitas mulai dari material, pengemasan hingga daur ulang dalam program 100% *fair and equal*. Kepala H&M untuk urusan industri yang ramah lingkungan, mengungkapkan bahwa perubahan trend pada pola perilaku konsumen tentang di mana dan bagaimana produknya dibuat menjadi pertimbangan perusahaannya tersebut. H&M kemudian memberikan akses transparansi online kepada konsumen (Gedda, 2019). India setidaknya memiliki 41 *outlet* H&M yang tersebar di seluruh negeri. Pemasok H&M di India untuk produksi global berasal dari RAJ Overseas, Visions Exports, First Garment India Ltd, Tirubala International, Eastman Exports Global Clothing, Bangalore Greenkraft Producer Company Ltd, Arvind Ltd, Ramayana Handicraft dan masih banyak lagi (H&M Group, 2019).

Belanda, Spanyol, Jerman, Prancis dan Italia merupakan lima diantara anggota Uni Eropa yang menjadi pusat berkembangnya bisnis berkelanjutan. Sebanyak 98.5% dari 1.832 pengecer di lima negara tersebut memilih sumber/bahan-bahan yang berkelanjutan. Dalam laporan yang ditulis Uni Eropa terkait pasar bagi produk-produk berkelanjutan pada Mei 2019 menyebutkan bahwa retailers di kawasan tersebut melaporkan adanya

peningkatan jumlah penjualan atas produk-produk berkelanjutan sebanyak 85% dalam lima tahun terakhir dan memperkirakan kenaikan hingga 92% pada lima tahun ke depan. Sementara itu, 96% pengecer telah memiliki strategi untuk menelusuri sumber-sumber yang berkelanjutan. Dalam bisnis industri tekstil, salah satu pengecer terbesar di Italia bahkan menyebutkan perusahaannya akan melakukan penelusuran sumber kapas berkelanjutan hingga 100% di tahun 2025. Salah seorang desainer asal Italia, Brunello Cucinelli menggaji pekerjaanya dengan upah premium sehingga pendapatannya atau modal awal dari bisnisnya kembali dengan perlahan. Dibanding brand-brand ternama lain, Cucinelli lebih memastikan perusahaannya agar lebih ramah lingkungan dan bahan baku yang ia dapat dari India, Mongolia dan lainnya memberi perlakuan yang adil pada para buruh (Russell, 2018). Pengecer dari Spanyol juga menegaskan perusahaannya akan menjadikan konsep keberlanjutan sebagai pusat produksinya mengingat polutan dan konsumsi energi yang masif dari industri tekstil (International Trade Centre & European Commission, 2019).

Studi oleh *European Clothing Action Plan* (ECAP) mengungkap bahwa bisnis pakaian bekas mencapai angka 70% di Jerman tahun 2011 dan terus mengalami kenaikan setelah itu (Šajin, 2019). Sebagian besar pengecer di Jerman juga lebih memilih untuk membeli barang dari Portugal, negara anggota EU lain, yang menyediakan kuantitas produk lebih banyak sesuai standar EU sendiri. Selain itu, retailer C&A asal Jerman bahwa perusahaannya telah memetakan keseluruhan rantai suplai dan memastikan seluruh proses transparansi pada konsumen (Pandey, 2018). Jerman bahkan memiliki *Global Safety*

Textiles yang merupakan pabrik tekstil teknis yang memproduksi tekstil secara ramah lingkungan dan transparan lengkap dengan aplikasinya. Perusahaan milik Jerman ini memiliki cabang di tujuh negara dan mempekerjakan sekitar 4.300 orang (Wazir Advisors, 2016). Produk mentah Turki juga mulai banyak diminati perusahaan-perusahaan pakaian di Uni Eropa karena memiliki teknologi maju yang menyediakan produk-produk berkelanjutan (International Trade Centre & European Commission, 2019).

Beberapa perusahaan tekstil/pakaian di kawasan seperti DyeCoo dari Belanda bahkan mulai mentransformasi teknik pewarnaan dengan menggunakan CO₂ sebagai pengganti air. Selain itu, Belanda memiliki organisasi *Rank-a-Brand* yang memberi evaluasi pada sejumlah brand dan retailer dengan ukuran hukum tenaga kerja internasional termasuk penyelidikan terhadap pekerja anak (Richero & Ferrigno, 2017). Prancis juga mengharuskan produk-produk lokal memiliki standar Oeko-Tex yang memastikan praktik-praktik ramah lingkungan yang diaplikasikan pada seluruh penyuplai dan pabrik. Selain Oeko-Tax, adapula regulasi 'RICH', sertifikasi ISO 26000 dan sebagainya yang ditekankan dalam produk-produk yang ada di negara tersebut sebagai agenda pemerintah berdasarkan Perjanjian Iklim Paris. Terlepas dari itu, pengecer-pengecer di Prancis tetap mengandalkan impor tekstil mentah dari luar kawasan, terutama India. Oleh karena itu, mereka mulai melakukan pendekatan sedikit demi sedikit untuk melakukan R:Evolution yang dimulai dengan eksplorasi, pemantauan dan pengukuran, penjelajahan dan sebagainya untuk menggiatkan penyuplai menghadapi tantangan keberlanjutan dengan cara beradaptasi pada praktik-

praktik yang ditetapkan negara tersebut (International Trade Centre & European Commission, 2019).

Sementara dari Inggris, salah satu *partner* dagang terbesar bagi tekstil India, memiliki inisiatif *Fashion Switch* yang diluncurkan pada *London Fashion Weeks* tahun 2017 oleh *British Fashion Council* yang bekerja sama dengan desainer Vivienne Westwood dan walikota London untuk mengajak industri tekstil keseluruhan beralih pada penggunaan energi hijau di tahun 2020 (Nature Climate Change, 2018). Adanya perubahan dalam sistem produksi di sejumlah perusahaan di negara-negara anggota Uni Eropa mendorong pemasok bahan mentah terutama dari India perlu mengubah standar untuk menyesuaikan keinginan dari negara pemasok. Hukum dalam negeri dan kawasan Uni Eropa yang menekankan aturan ketat untuk standar ketat lingkungan dan sosial memunculkan potensi atas kebijakan proteksionisme dalam kawasan Eropa atau disebut *Eurozone Protectionist Agenda* dengan alasan bahwa negara pemasok lebih mudah mendapatkan sumber dari negara-negara sesama anggota yang berada di bawah hukum Uni Eropa.

C. Bentuk-Bentuk Perubahan Dalam Kebijakan Tekstil India

Munculnya norma keberlanjutan yang mempengaruhi masyarakat global untuk lebih bijak dalam berpakaian mendorong para perusahaan merk ternama tidak hanya memikirkan produk apa yang mereka jual dan besarnya keuntungan yang didapat, namun berapa harga yang harus dibayarkan terkait dampaknya pada lingkungan dan nasib buruh yang berada pada lingkaran bisnis tersebut. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki inisiatif-inisiatif

dalam mengikuti *trend* konsumen tersebut akan memperoleh keuntungan lebih dari yang lain (Srivastava, 2019).

Namun ramah lingkungan khususnya dalam bisnis tekstil dan industri manapun tidaklah murah. Penggunaan material organik, praktik-praktik *fair trade*, *artful management* membuat produk akan lebih mahal daripada yang diproduksi secara masal dengan teknologi konvensional. Ada kekhawatiran lain bahwa *sustainable fashion* bahkan tidak akan sepopuler produksi dalam *fast fashion*. Perusahaan umumnya khawatir bahwa harga yang relatif tinggi dari *sustainable product* akan mengurangi jumlah permintaan dari masyarakat kelas bawah (Khandual & Pradhan, 2019). Ketika India pada akhirnya setuju untuk turut menanggung beban polusi global akibat industrinya, hal tersebut memunculkan kontradiksi terkait perubahan kebijakan yang ramah lingkungan dengan usaha penuntasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan industrialisasi (Jones & Saran, 2015).

Selain itu, pernyataan resmi India melalui PM Narendra Modi bahwa negaranya sedang dalam tahapan menuju *\$5 trillion economy* tahun 2025 dan *\$10 trillion economy* tahun 2030 memunculkan dilemma dari para ahli terkait tantangan dalam ambisi pertumbuhan industri yang *environmental-friendly*. Graham Institute menegaskan bahwa usaha untuk mempercepat angka pertumbuhan ekonomi memang perlu dilakukan namun dibarengi dengan inovasi serta pengembangan teknologi untuk lingkungan melalui sistem yang lebih bersih dan hijau. Para ahli ekonomi dari World Bank juga menambahkan bahwa apabila India ingin menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan, maka India perlu memilah pemakaian sumber daya dan

memakai kerangka ekosistem dalam pembuatan kebijakan ekonominya (Saha & Misra, 2019). Hal ini dibuktikan bahwa ketika India telah memiliki sejumlah kebijakan ramah lingkungan yang diadopsi dalam industri tekstilnya, India belum dapat mengimplementasikan keseluruhan komitmennya pada sejumlah target. Berikut adalah bentuk-bentuk transformasi kebijakan tekstil yang di sisi lain memunculkan penekanan bahwa kebijakan ramah lingkungan bukanlah prioritas bagi India.

1. RECP: 5F

Melalui *Textiles India 2017*, PM Modi mempresentasikan 5F: *Farm to Fibre, Fibre to Fabric, Fabric to Fashion, Fashion to Foreign* dalam program *Resource Efficient and Cleaner Production (RECP)* menuju *Next Big Textile Revolution*. Representasi UNIDO untuk India, Rene Van Berkel, mengatakan kerangka 5F yang dibentuk Pemerintah India merupakan salah satu pelaksanaan mandat dari UNIDO untuk kemajuan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Selama perhelatan acara, Menteri Industri Teksil India, Smriti Zubin Irani dan Berkel meluncurkan laporan '*Textile Parks in India: Creating Sustainable Value Chains*' yang mendokumentasikan 66 sektor tekstil yang tersebar di 15 negara bagian, mendatangkan \$4.2 miliar investasi asing dan membuka 400.000 peluang kerja. RECP yang disponsori pemerintah Swiss dan UNIDO di India dapat memberi manfaat bagi industri tekstil dan garmen dengan meningkatkan daya saing yang disesuaikan dengan standar internasional (Berkel, 2017). RECP merupakan platform yang diinisiasi UNIDO dan UN *Environment Programme* (UNEP) untuk mendampingi pemerintah dan industri dalam memajukan dan merubah sistem ekonomi mereka menuju *2030 Agenda for Sustainable*

Development dan pemenuhan target SDGs nomor 9 terkait industri (UNIDO, 2019).

Kebijakan 5F kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan *Farm to Fashion*. *Farm to Fashion* merupakan inisiatif yang menyediakan platform bagi keseluruhan rantai tekstil untuk mengembangkan visi industri tekstil tahun 2035 yang fokus pada area pertanian, pemberdayaan wanita, peluang bagi kaum muda, serta upaya menjadikan industri tekstil sebagai *pioneer* industri ramah lingkungan. Pada pertemuan di *Indian Textile Global Summit* tahun 2018 di Ahmedabad, pemerintah mengeluarkan *white paper* mengenai *Vision 2030 for Textile Industry* (Gujarat Chamber of Commerce & Industry, 2018). Pertemuan global dalam *Farm to Fashion* diadakan pada awal Januari 2019 di Gandhinagar, Gujarat. Pada pertemuan di tahun ini, kementerian tekstil dan kamar dagang dan industri Gujarat menetapkan lima tema yakni: mempersatukan pebisnis, industri, dan penanam modal dalam satu platform tekstil, diskusi tujuan pembangunan berkelanjutan dan praktik tekstil India, tantangan industri tekstil, serta desain *road map* untuk industri tekstil India ke depan (Farm to Fashion, 2019).

Meskipun menekankan pada perbaikan mulai dari pertanian khususnya kapas, perusahaan umumnya masih keberatan untuk meminimalisir penggunaan pestisida guna meningkatkan penjualan yang bersaing dengan *bt-cotton*. Tahun yang sama ketika PM Modi mengumumkan 5F, setidaknya 50 petani kapas di Maharashtra meninggal akibat keracunan pestida (Jain, 2019). Satish W. Wagh, mantan pimpinan perusahaan kimia Chemexil, mengatakan bahwa adanya batasan penggunaan bahan kimia dalam industri guna meminimalisir pencemaran merupakan hal yang dapat menghambat proses

pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang seperti India (Khan, 2019). Dari segi pemberdayaan wanita, *farm to fashion* juga dinilai belum memenuhi kebutuhan bagi pekerja wanita. Perusahaan Sahi Exports tercatat mensubordinasikan buruh wanita yang tidak memiliki waktu untuk istirahat dan upah yang tidak setara. Kasus tersebut baru ditangani setelah adanya desakan dari American Watchdog Group di tahun 2018 (Yar, 2019).

2. *The National Solar Mission*

The National Solar Mission merupakan serangkaian kebijakan *National Action Plan on Climate Change* pada masa PM Mahmoan Singh tahun 2010 (Ministry of New and Renewable Energy, 2010). Pada Desember 2016, pemerintah menyediakan 34 *solar parks* di 21 negara bagian. Dari target mencapai 20GW tahun 2022 instalasi energi matahari, pemerintahan PM Modi menambahkan target hingga 100GW di tahun yang sama (Solar Energy Corporation of India Limited, 2019). Uni Eropa juga memberikan bantuan sebesar €1.66 miliar untuk pengaplikasian energi matahari selama tahun 2016-2019 melalui *technical assistance for the implementation and management of identified solar parks* (Tschampa, 2019). Ekspansi implementasi sebagian besar ditangani oleh pemerintahan negara bagian (Ebinger, 2016).

Tamil Nadu merupakan negara bagian yang memproduksi tekstil ketiga terbesar di India. Dengan adanya berbagai tantangan dalam industri tekstil seperti visi lingkungan dan persaingan pasar global dengan Bangladesh dan Vietnam, pemerintah negara bagian Tamil Nadu merilis dokumen tahun 2019 dalam *Vision 2023 Tamil Nadu* untuk meningkatkan produktivitas tekstil sebagai negara bagian yang memproduksi tekstil terbesar

ketiga di India. Melalui agenda *the Tamil Nadu New Integrated Textile Policy*, terdapat beberapa target:

- a. Mencapai pertumbuhan berkelanjutan pada seluruh rantai produksi tekstil
- b. Meningkatkan produktivitas kapas
- c. Mendukung industri untuk beralih pada teknologi terbarukan dan mengadopsi standar lingkungan sosial global, dsb

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah negara bagian akan membantu meningkatkan *capacity building* dan sektor *processing* yang ramah lingkungan. Pemerintah juga akan mensubsidi penggunaan energi matahari dari Rs 223.000 – Rs 855.000 untuk satu sektor kecil melalui instalasi *Solar Photo Voltaic* (Government of Tamil Nadu, 2019).

Meskipun menekankan akan penggunaan energi matahari pasca Perjanjian Paris, impor batubara justru terus mengalami kenaikan. Selama April-Juni 2019, pemerintah India tercatat mengimpor batubara terbesar dalam lima tahun terakhir sebanyak 74 juta ton yang diperlukan dalam upaya mempercepat infrastruktur (Singh, 2019). Sektor tekstil di India sendiri merupakan salah satu industri yang mengonsumsi energi paling besar dengan teknologi kuno terutama pada sektor yang terdesentralisasi. Produksi tekstil rumahan memakan energi 70-80% dari total produksi tekstil secara keseluruhan (Bhaskar, Verma, & Kumar, 2012).

Analisis mengungkapkan bahwa India merupakan salah satu pihak yang skeptis tentang perubahan iklim. Data dari *The Rangarajan Committee* tahun 2011-12 menyebutkan 363 juta orang di India hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak memiliki akses ke sumber energi.

Jones dan Saran dari The Brookings Institute dalam argument mereka mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan di India adalah melalui percepatan pembangunan dengan sumber energi apapun (Jones & Saran, 2015). Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa prioritas India adalah menyediakan akses sumber energi yang terjangkau bagi 300 juta warganya (Saryal, 2018). Pasca pertemuan COP15 di Kopenhagen tahun 2009, majelis tinggi India (Rajya Sabha) menegaskan bahwa perubahan iklim harus dialamatkan sebagai agenda kebijakan luar negeri dengan tanpa menghalangi upaya pertumbuhan dan pembangunan India. Dengan demikian, perubahan kebijakan ramah lingkungan India dibangun atas dasar pertumbuhan ekonomi, bukan pada kesepakatan iklim global (Dubash, 2013).

Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar kebijakan pemerintah pada hampir semua sektor industri termasuk tekstil masih mengedepankan industri linear untuk beberapa tahun ke depan meskipun beberapa ahli mendesak pemerintah India untuk memulai mengaplikasikan keseluruhan komitmen industri ramah lingkungan dari tahun 2018. Sebagai contoh, 70% dari rencana infrastruktur untuk tahun 2030 masih memakai sistem konvensional yang akan menambah beban angka polusi udara. India bahkan diprediksi akan dibanjiri permintaan tekstil sebanyak tiga kali lipat menjadi 15 miliar ton pada tahun 2030 apabila tetap memakai konsep industri tekstil konvensional yang cepat dan murah (Mohanraj, 2019). Bukan tanpa alasan, prediksi pada tahun 2050 menunjukkan akan terjadi peningkatan PDB di seluruh dunia hingga 400% yang akan memicu jumlah permintaan akan pakaian (Drew & Reichart, 2019).

3. Pengolahan Limbah melalui ZLD

Dalam rangka memberi perhatian lebih pada industri tekstil sebagai penyebab masifnya penggunaan air bersih dan pembuangan limbah secara sembarangan, kementerian lingkungan, perhutanan dan perubahan iklim (KLKPI) mengumumkan kebijakan *Zero Liquid Discharge* (ZLD) tahun 2016. Konsep ZLD ini merupakan salah satu komitmen dari Perjanjian Paris yang masuk dalam kerangka *Zero Defect Zero Effect*. Kebijakan ZLD mengharuskan tiap industri untuk mengolah limbah tekstil sebanyak 25 kilo liter per hari dan penggunaan garam bersodium sulfat yang memungkinkan air dapat digunakan kembali untuk konsumsi domestik. Kebijakan yang sudah dibicarakan sejak tahun 2015 ini telah mengajak 50% unit yang berorientasi ekspor dan 50% unit pemasok domestik (Ministry of Environment, Forests & Climate Change, 2015). Di sisi lain menurut Sekretaris tekstil, S.K. Panda, implementasi ZLD memberatkan industri kecil dan menengah akibat terbatasnya sumber daya. Di Rajashtan, industri-industri tekstil mulai mengadopsi ZLD berdasarkan perintah pengadilan terkait kelangkaan air. Sementara hal yang sama terjadi di Tirupur ketika unit-unit tekstil di Chennai menginstal ZLD untuk mematuhi arahan pengadilan (Centre for Environment Education & Industrial Pollution Prevention Group, 2016).

Selain instalasi solar panel, negara bagian Tamil Nadu juga membuka unit-unit pewarnaan yang sesuai dengan *zero liquid discharge* (ZLD) untuk pengolahan limbah guna memenuhi standar lingkungan yang dikelola oleh *Pollution Control Board*. Pemerintah akan fokus pada pengaturan CETPs dan fasilitas ZLD untuk membenahi *Green Field Textile Processing Parks*. Keseluruhan, infrastruktur untuk perlindungan lingkungan akan

disubsidi sebanyak 25% dari total anggaran modal. Skema *One Time Assistance for Energy, Water Conservation, and Environmental Compliance* akan dipadukan dalam unit-unit sektor industri selama tiga tahun ke depan. Subsidi sebesar 50% untuk audit energi, lingkungan dan air serta 20% subsidi untuk konservasi energi dan air juga akan diberikan juga akan diberikan untuk memperbaiki standar lingkungan (Government of Tamil Nadu, 2019).

Departemen industri dan penambangan Gujarat mengumumkan kebijakan tekstil yang baru dalam *the Scheme for Assistance to Strengthen Specific Sectors in The Textile Value Chain* yang berlaku sejak September 2018 hingga 2023. Kebijakan tersebut dibuat untuk memberi subsidi sebesar 6% pada peminjaman, tariff daya, serta dorongan agar perusahaan lebih menghemat penggunaan air dan meminimalisir polusi yang dapat mencemari lingkungan. Namun, sejumlah industri menyangkan subsidi untuk perlindungan lingkungan yang disamakan dengan pemberian subsidi pada sektor lain. Menurut kepala komite tekstil, Kamar Dagang dan Industri Gujarat (GCCI), Meena Kaviya mengatakan bahwa subsidi sebesar Rs 30 lakh dinilai tidak cukup untuk manajemen efisiensi energi dan pengaplikasian ZLD (TNN, 2019).

Berdasarkan laporan kebijakan tekstil tahun 2019, negara bagian Haryana memiliki visi untuk mengencarkan produksi tekstil tingkat global dengan mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap keseluruhan rantai produksi. Sebagai salah satu pusat eksportir tekstil berbahan kapas, Haryana menekankan kerangka *fibre to fashion*. Implementasi ZLD untuk mengolah limbah tekstil akan disubsidi melalui bantuan fiscal sebesar 75% yang disesuaikan dengan

standar internasional (Department of Industries & Commerce Haryana , 2019).

Namun, pengolahan limbah melalui sistem ZLD memiliki beberapa tantangan dalam implementasi seperti perlunya investasi yang besar karena biaya perawatan yang tinggi. Selain itu, ZLD disebut tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan, melainkan hanya kesehatan karena pemakaian ZLD memerlukan daya dan energi yang besar (Zsakay, 2018). ZLD justru memakan konsumsi energi sebanyak 50% dalam industri. Kebijakan ini juga dapat menaikkan harga produk jadi yang memberatkan konsumen akibat dipengaruhi oleh naiknya biaya produksi hingga 25-30%. Di Tirupur, pengoperasian ZLD memakan biaya Rs 200-250 per kilo liter dibanding industri yang tidak mengoperasikan ZLD di angka Rs 15-30 per kilo liter (Centre for Environment Education & Industrial Pollution Prevention Group, 2016).

4. Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hingga pertengahan tahun 2016, pemerintah setidaknya telah mengkonversikan 44 pasal ke dalam empat kode yang berkaitan antara hubungan antar industri, upah, keamanan sosial dan keselamatan (Wazir Advisors, 2016). Namun baru pada Juli 2019, undang-undang tersebut disahkan Parlemen India dengan nama *the Code on Wages: the code on occupational safety, health, and working condition bill*. Hal ini terkait pemberian upah minimum yang berbeda-beda ditiap negara bagian, kondisi ruang kerja yang tidak layak seperti minimnya ruang terbuka, tidak adanya cek kesehatan rutin bagi pekerja dan sebagainya. Di dalam *code on wages*, industri harus memberikan biaya cek kesehatan rutin secara gratis, jaminan kesetaraan gender dan anti diskriminasi dan

sebagainya (Ministry of Labour & Employment, 2019). Di tahun sebelumnya, pemerintah pusat sempat menaikkan upah 10% atau naik menjadi Rs 375 per hari/Rs 9750 untuk 26 hari kerja. Namun kebijakan tersebut tidak mengikat sehingga masing-masing negara bagian memiliki upah minimum yang berbeda-beda (Sengupta, 2019).

Dari segi kesejahteraan buruh, pemerintah akan memberi tunjangan pensiun sebesar Rs. 1,000 per bulan khusus untuk sector *handloom* yang mempekerjakan banyak orang. Sementara dalam sektor investasi asing langsung (FDI), Tamil Nadu memberi keringanan agar tidak perlu memerlukan persetujuan pemerintah pusat atau Bank India (RBI). Investor hanya perlu memberikan surat keterangan kepada kantor regional RDI dalam 30 hari sebagai syarat. Dalam pembaruan teknologi, Tamil Nadu juga mengadopsi TUFs sebanyak 20% (Government of Tamil Nadu, 2019).

Meskipun *code of wages* ditekankan untuk menjamin upah minimum pada tiap-tiap sektor di seluruh negeri, di dalamnya masih tidak jelas mengenai bagaimana penerapan upah minimum tersebut diimplementasikan. Dengan kata lain, ketika banyak pekerja yang menuntut standar upah minimum, para atasan masih dapat dengan mudah untuk menolak atau menyuruh mereka mencari pekerjaan lain. Salah satu kelebihan yang dimiliki India adalah tenaga kerja yang relatif murah terutama dalam sektor tekstil. Bangladesh dan Pakistan masih memiliki upah buruh yang lebih rendah dibanding India yang artinya tekstil India akan kembali bersaing dalam sektor produktivitas dan sumber daya manusia. Professor ekonomi dari Xavier School di Jamshepdur, Shyam Sundar mengatakan bahwa hambatan terbesar bagi

ekonomi India adalah bukan karena lemahnya regulasi ketenagakerjaan, namun karena regulasi ketenagakerjaan tidak benar-benar menjadi kekhawatiran (Sanghera, 2019).

5. Pembaruan Teknologi

Technology upgradation menjadi salah satu agenda dalam *zero defect zero effect* yang ditekankan untuk efisiensi energi dan mengurangi beban polusi. Laporan UN Climate Change dalam platformnya, *Sustainable Textile for Sustainable Development* menyebutkan bahwa perusahaan mikro, kecil dan menengah hingga saat ini mulai memproduksi 100% produk ramah lingkungan dan mengurangi pengeluaran sekitar 40% (€3.3 juta) dari total investasi. Tekstil merupakan industri dengan kebutuhan akan zat kimia terbanyak setelah sektor agrikultur. Di India khususnya negara bagian Rajasthan, industri tekstil menyumbangkan limbah berbahaya sementara tempat pengolahan limbah yang memadai belum tersedia. Di sisi lain, tekstil merupakan sektor peluang kerja terbesar kedua di India. Meskipun berkontribusi dalam kemajuan ekonomi, proses produksi yang tidak ditangani dengan baik meningkatkan resiko masalah kesehatan pada pekerja dan lingkungan. Dengan menggunakan SusTex, industri tekstil India dapat memperbarui teknologi ramah lingkungan serta melindungi nasib buruh tekstil (United Nations Climate Change, 2008).

Sementara dalam sektor *powerloom*, pemerintah pusat menginisiasi *Integrated Scheme for Powerloom Sector Development* (ISDP) yang mencakup *Solar Energy Scheme* dan *Pradhan Mantri Credit Scheme for Powerloom Weavers* dengan satu skema dalam *the Comprehensive Scheme for Powerloom Sector*

Development tahun 2017 dan akan berlaku hingga tahun 2020. Skema ini memastikan industri untuk mengaplikasikan *Technology Upgradation Application Fund Scheme* (TUFS) yang akan disubsidi oleh pemerintah negara bagian sebanyak 60% dan oleh investasi swasta sebanyak 40% tergantung pada jenis mesin. Pengaplikasian subsidi untuk energi matahari akan diaplikasikan pada setiap unit *powerloom* yang memiliki setidaknya 8 alat tenun dalam rangka mencapai SDG pemerintah. Selain sebagai pembaruan teknologi, skema ini dibuat untuk meningkatkan daya saing terutama pada sektor yang terdesentralisasi serta dapat memberikan lingkungan kerja yang lebih baik (Ministry of Textiles, 2017).

Di sisi lain, pengamat dari Indian Institute of Technology, Prakash Khude mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya modernisasi, pemakaian mesin berteknologi kuno masih intens di mana hingga tahun 2017 konsumsi energi yang tidak dapat diperbarui untuk sektor tekstil masih mewakili angka 15-20% dari total keseluruhan industri (Khude, 2017). Sektor tekstil sendiri merupakan salah satu industri yang mengonsumsi energi paling dengan teknologi kuno terutama pada sektor yang terdesentralisasi. Produksi tekstil rumahan memakan energi 70-80% dari total produksi tekstil secara keseluruhan (Bhaskar, Verma, & Kumar, 2012).

Dari adanya pemaparan di atas menunjukkan bahwa transformasi kebijakan tekstil di India belum diimplementasi secara intens. Salah satu kendala sulitnya penerapan industri yang mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan menurut penelitian *Mudra Institute of Communication, Ahmadebad/MICA* adalah kurangnya

kepedulian akan lingkungan yang berkaitan dengan industri tekstil di negara tersebut (Parikh, 2018). Hal ini dikarenakan transisi menuju industri yang lebih ramah lingkungan merupakan suatu hal yang *high cost* dan tidak efisien yang bertentangan dengan rencana percepatan industri India. Selama ini, permintaan tekstil yang masif dipenuhi dengan proses konvensional yang menuntun industri meningkatkan penggunaan serat sintetis dan bahan kimia dalam pewarnaan (Bhutoria, 2018). Namun, dengan konsep *take, make, recycle*, perusahaan tidak lagi memproduksi barang dalam jumlah masif (Mohanraj, 2019).

India merupakan negara yang memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 7.2% di akhir tahun 2019. Namun, pada bulan April-Juni terjadi penurunan perlambatan sebanyak 6% dibandingkan tahun sebelumnya di angka 7.4%. Momentum pertumbuhan ekonomi yang lambat di India dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan global dari 3% di tahun 2018 menjadi hanya 2.3% di tahun 2019 menurut UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) (Ians, 2019). Sektor tekstil merupakan sektor yang menyumbangkan pendapatan nasional terbesar kedua yang menjadi salah satu penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat melemahnya integrasi tekstil ke pasar Eropa. Untuk itu, pemerintah mencari cara agar bagaimana ekspor tekstil India mencapai \$82 miliar di tahun 2021. Meskipun ‘permintaan tekstil’ di sini dapat mengarah pada permintaan pasar yang menekankan praktik-praktik etis ataupun yang bukan, perusahaan harus memainkan cara bagaimana mengakomodasi jenis-jenis permintaan tersebut dengan biaya produksi yang murah (Segran, 2019).

Dengan kata lain, kebijakan tekstil yang ramah lingkungan India masih memprioritaskan profit di atas perlindungan lingkungan maupun praktik etis. Seorang advokat bisnis, Subhash Bhutoria, mengatakan bahwa hukum yang mengikat terkait lingkungan tidak akan mencegah bisnis tekstil dan pakaian di India dengan metode konvensional untuk terus beroperasi. Amandemen undang-undang lingkungan terkait unit-unit tekstil yang diperbarui oleh kementerian lingkungan pasca ratifikasi Perjanjian Paris menurut Bhutoria tidak mencakup norma-norma batasan terhadap keluaran emisi dari industri tekstil meskipun terdapat wacana bahwa pemerintah akan terus melakukan amandemen hukum lingkungan terkait tekstil untuk mengatur emisi gas rumah kaca dan polusi air seperti salah satunya pada amandemen UU lingkungan tahun 2019 (Bhutoria, 2018). Peneliti dari Brookings Institute, Charles Frank bahkan berasumsi bahwa *Intended Nationally Development Contribution* (INDC) yang diajukan India ke UNFCCC dengan target di tahun 2030 akan gencar dilakukan dengan skenario *business as usual* dengan penggunaan batubara (Ebinger, 2016).

Oleh karena itu, transformasi kebijakan yang ramah lingkungan India belum meninggalkan industri tekstil dengan sistem linear (konvensional) yang telah lama menjadi akar rantai produksi. Transformasi kebijakan diadopsi karena adanya penambahan jenis pasar baru yang menginginkan konsep keberlanjutan (transparansi dan ramah lingkungan) dalam sistem produksi. Pengadopsian kebijakan ramah lingkungan terutama ke dalam industri tekstil merupakan hal yang bertentangan antara konsep keberlanjutan dengan upaya percepatan industri di India meskipun memang dengan beralihnya sektor tekstil ke produksi yang lebih menginklusi lingkungan dan

memperhatikan etika tenaga kerja akan lebih meningkatkan produktivitas penjualan ke negara-negara yang menjadikan ramah lingkungan dan praktik etis sebagai prioritas (Aspengren & Nordenstam, 2019). Di sisi lain, laporan *energy initiative* dari Brookings Institute tahun 2019 menyebutkan bahwa India masih memerlukan batubara dalam percepatan industri dan energi terbarukan digunakan untuk melengkapi proses karena industri yang terlalu kotor dapat mengalami kebangkrutan. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa transisi India ke industri ramah lingkungan memang terkait masalah lingkungan dalam negeri terutama polusi, namun tidak lantas menjurus pada isu perubahan iklim (Tongia & Gross, 2019).

Melihat dari adanya kontradiksi antara komitmen perubahan dengan implementasi mengindikasikan bahwa India masih mengedepankan harga murah, efisiensi dan percepatan dalam sistme industri dalam negeri. Kebijakan-kebijakan ramah lingkungan yang diadopsi India masih hanya pada batas komitmen yang menunjukkan bahwa India mulai mengikuti standar-standar internasional terkait lingkungan dan sosial. Pasca India meratifikasi Perjanjian Paris, Uni Eropa mengadopsi *EU's Strategy for India* tahun 2018 yang ditujukan untuk memaksimalkan usaha India beralih pada industri terbarukan seperti energi, modernisasi, perubahan iklim, kerja sama strategis dan sebagainya. Peneliti dari Swedish Institute for International Affairs, Aspengren dan Nordenstam dalam laporan *The Partnership Shift: Analysing the EU's Strategic Engagement with India* mengatakan bahwa peningkatan kerja sama disebabkan karena Uni Eropa masih memandang India sebagai *partner* ekonomi dan strategis yang penting. Setelah memiliki visi yang sama

untuk energi terbarukan, India dan Uni Eropa dapat mengejar kepentingan ekonomi bersamaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 (Aspengren & Nordenstam, 2019).

Meskipun demikian, tidak tepat untuk menyebut bahwa industri ramah lingkungan dalam tekstil sebagai sesuatu yang pantas diperdebatkan dalam hitung-hitungan untung-rugi karena dengan mengadopsi industri yang lebih ramah lingkungan, negara manapun akan memperoleh berbagai kelebihan seperti tingkat polusi yang rendah, efisiensi air bersih, kesehatan masyarakat hingga peningkatan kesejahteraan apabila ekonomi nasional dapat mengkonversikan energi ramah lingkungan ke dalam hitungan matematis. Kütting juga menambahkan bahwa konsep ekologi dan industri memang bertentangan, namun munculnya diskursus pertimbangan moral dalam berperilaku konsumtif dapat membawa perubahan dalam sistem produksi di mana ketika standar kehidupan masyarakat semakin meningkat maka jadi mungkin bagi mereka untuk mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan-sosial atas suatu barang meskipun dengan harga tinggi (Kütting, 2004).

Dosen ilmu lingkungan di Univerity of Washington, Badri Gopalakrishnan, juga mengkalkulasikan bahwa apabila industri tekstil India menggunakan teknik pewarnaan natural, maka perusahaan dapat menghemat biaya konsumsi bahan kimia serta meminimalisir emisi gas padat untuk tekstil kapas hingga 30% dan tekstil wol 20% (Gopalakrishnan B. N., 2018). Dari segi bentuk kerja sama dagang, ketika India mulai menunjukkan praktik keberlanjutan yang memiliki *common values* dengan Uni Eropa, kerja sama diantaranya menguat di tahun 2018 yang oleh Dr. Garima Mohan disebut sebagai *common*

action dalam peningkatan kerja sama ekonomi, strategis serta promosi SDGs (Mohan G. , 2019).

Secara garis besar, industri ramah lingkungan dapat menguntungkan meskipun membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ekonomi konvensional. Adanya transformasi dalam keseluruhan kebijakan industri termasuk tekstil memang mendorong perkembangan awal kerja sama India dan Uni Eropa ke depan dalam konsep *common values common action* di tahun 2018. Namun India memerlukan proses untuk benar-benar beralih pada industri yang ramah lingkungan di mana negara tersebut masih mengandalkan energi fosil untuk industri. Perubahan dalam kebijakan khususnya tekstil ini merupakan agenda untuk mendorong pertumbuhan ekspor khususnya ke Uni Eropa meskipun pemerintah masih mengakomodasi permintaan pasar yang tidak mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan. Melalui kebijakan saat ini, India diproyeksikan akan menambah penyerapan tenaga kerja hingga 36 juta dan level produksi mencapai \$350 miliar tahun 2024-25 pada industri tekstil menurut kementerian tekstil dalam *Vision, Strategy and Action Plan for Indian Textile and Apparel Sector* (Make in India, 2017).

Dengan demikian, kebijakan tekstil yang ramah lingkungan di India merupakan bentuk respon dari adanya standar Uni Eropa dalam membangun kerja sama yang didasarkan pada klausul lingkungan dan sosial. Penetapan standar lingkungan dan sosial dari Uni Eropa tersebut berasal dari adanya perubahan perilaku masyarakat yang mulai menginklusi kekhawatiran terhadap isu-isu iklim dan etisme dalam kebijakannya. Meskipun pemerintah India mulai mengusahakan adanya transformasi dalam industrinya, keberlanjutan industri konvensional pada

hampir semua sektor termasuk tekstil mengindikasikan bahwa India tidak lantas meninggalkan industri tekstil konvensional. Transformasi industri tekstil ke arah yang lebih ramah lingkungan merupakan strategi untuk mengakomodasi permintaan pasar baru di Uni Eropa tanpa memprioritaskan isu perubahan iklim global.